BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Taiji menjadi daerah pesisir Jepang yng mempunyai tradisi berburu paus yang panjang. Beberapa metode penangkapan telah berkembang di wilayah pesisir Jepang. Penangkapan komersial diawali oleh Chubei yang memimpin kelompok berburu paus dan memperkenalkan teknik penangkapan dengan menggunakan tombak genggam pada tahun 1606 Salah satu penemuan metode penangkapan ikan paus pada abad 19 awal yaitu metode jarring (amirotiho) oleh Wada Kakuemon, seorang nelayan Taiji. Dengan cepat metode ini telah menyebar dan digunakan nelayan seantero Jepang dan mendominasi kegiatan penangkapan paus hingga akhir abad 19. Metode ini juga didukung dengan dibentuknya kelompok besar pemburu paus yang menangkap paus dengan mengarahkan paus menuju tepi pantai.

Metode ini bertahan cukup lama hingga masuk metode penangkapan baru yang diadopsi dari negara-negara selain Jepang yang menangkap paus juga seperti Norwegia. Metode ini menggunakan tombak bertenaga uap, yang biasanya dilengkapi dengan kapal yang dilapisi baja. Hal ini juga menyebar ke seluruh Jepang. Kebangkitan Jepang dalam hal industry whaling. Pada tahun berikutnya perusahan-perusahaan penangkapan ikan paus telah berdiri di sepanjang Pantai Pasifik Jepang. Di Taiji sendiri telah berkembang penangkapan dengan jaring seperti disebutkan sebelumnya, namun menyasar paus kecil juga seperti lumba-lumba dan paus pilot. Kegitan ini dilakukan diluar musim perburuan paus dan menjadi agenda tahunan hingga sekarang. Kegiatan ini menjadi penting di

wilayah Taiji setelah peristiwa yang menewaskan 111 nelayan Taiji pada tahun 1878. Kekuatan paus berbnding terbalik dengan kekuatan sekelompok nelayan yang tidak sanggup menahan paus hingga mereka tewas karena perburuan ini. Hingga sekarang penangkapan paus kecil dan lumba-lumba menjadi sumber pendapatan warga Taiji hingga saat ini.

Perburuan lumba-lumba dan paus kecil lainnya terus dilakukan nelayan Taiji hingga saat ini. Setiap tahun lebih dari seribu lumba-lumba yang ditangkap oleh nelayan. Penangkapan dilakukan pada bulan September hingga Maret. Mereka berburu untuk diambil dagingnya untuk konsumsi manusia atau dijual kembali untuk Aquarium di seluruh dunia. Sebagian besar aquarium di seluruh dunia menangkap lumba-lumbanya di Taiji. Para pemburu lumba-lumba memburu dengan menggunakan kapal-kapal kecil. Ketika sekelompok lumba-lumba telah diketahui keberadaannya, para pemburu mendekat dan memasukkan sebuah pipa ke dalam air. Kemudian mereka mulai memukul-mukul pipa tersebut menggunakan palu sehingga sistem pendengaran lumba-lumba terganggu. Suara berisik tersebut membuat mereka berkumpul ke satu arah. Nelayan menggunakan hal ini untuk memojokkan lumba-lumba ke sebuah teluk. Disana mereka menutupnya dengan jarring sehingga lumba-lumba tidak bisa melarikan diri. Lumba-lumba dibiarkan disitu selama semalaman. Hari selanjutnya, pelatih lumba-lumba dari seluruh dunia berkumpul untuk memilih lumba-lumba mereka. Semua lumba-lumba tersebut dibeli dari nelayan lumba-lumba. Lumba-lumba yang tidak dibeli dibunuh satu persatu untuk konsumsi masyarakat Taiji dan dijual dagingnya.

Hal ini memicu protes dari berbagai kalangan, terutama para aktivis pecinta lumba-lumba. Richard O Barry, atau biasa dipanggil Ric O Barry membuat film The Cove yang menceritakan praktek pembunuhan lumba-lumba di Taiji. Praktek pembunuhan tersebut berkedok tradisi masyarakat local. Nama the cove sendiri merujuk pada teluk tempat yang dilarang dalam masyarakat Taiji yang menyebutnya sebagai "Private Area". Film ini berhasil membuka mata dunia dan memicu tindakan serupa dari aktivis lain. Para aktivis mulai berdatangan ke Jepang untuk melihat apa yang terjadi di Taiji. Film ini juga memunculkan pertanyaan dimana IWC selama pembunuhan lumba-lumba ini. Dalam film, Ric juga sempat melayangkan protes di depan semua perwakilan negara anggota IWC dalam salah satu pertemuan IWC. IWC sebagai badan resmi yang mengurusi masalah whaling, menyatakan lumba-lumba di Taiji bukan kewenangannya. Namun IWC pernah menangani penyelamatan lumba-lumba lain di teluk California, lumba-lumba Maui di New Zealand. Padahal dalam website resmi IWC disebutkan perhatian untuk paus dan lumba-lumba "many species of whales and dolphins are vulnerable to collisions with vessels". Hal ini menjadi keganjilan dibalik kinerja IWC melindungi paus saat ini IWC belum mampu menghentikan pembunuhan dan penangkapan lumba-lumba di Taiji, Jepang.

Penyelamatan lumba-lumba di Taiji telah gagal dilaksanakan karena telah terbukti ketidakefektifan International Whaling Commision (IWC), lembaga yang menaungi masalah perpausan atau whaling. Telah ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada ketidakefektifan lembaga yaitu IWC. Peran institusi yang menaungi masalah tersebut penulis nilai lemah. Ini dapat teridentifikasi melalui Efektivitas rezim yang dinyatakan

oleh Arild Underdal terdapat dua factor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu Problem Malignacy (Kerumitan Masalah) dan Problem Solving Capacity (Kapasitas untuk menyelesaikan masalah). Kedua factor tadi dikolaborasikan ke dalam tingkat kolborsi sehingga dapat disimpulkan keefektifan rezim tersebut dari tingkat kolaborasi dari 1 hingga 5.

Problem Malignacy adalah kerumitan masalah. Masalah yang terjadi rumit sehingga membuat negar-negara tidak mau bekerjasama secara politis. Problem Malignacy dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu Incongruity , Asymmetry, dan Cumulative Cleavages.

Incongruity diartikan sebagai ketidaksepahaman akibat semua negara anggota sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai permasalahan. Hal tersebut terjadi di dalam tubuh IWC. Tidak semua negara anggota IWC setuju dengan isu konservasi paus sebagai tujuan IWC saat ini. Sejak diberlakukannya moratorium tahun 1986, dan semakin bubarnya industry minyak paus, IWC mengubah tujuannya sebagai lembaga konservasi paus di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan tujuan awal dibentuknya IWC pada tahun 1946 adalah untuk mengatur stok paus untuk industry whaling dan minyak paus di dunia. Negara yang bergabung saat itu adalah negara yang memiliki industry whaling dan minyak paus. Hingga pada tahun 1982 terdapat desakan dari kalangan aktivis untuk mengurangi tangkapan ikan paus karena ikan paus di dunia jumlahnya menurun drastic. Akhirnya pada tahun 1986, IWC menerbitkan moratorium yang berisi larangan penangkapan paus untuk komersial. Hal itu menimbulkan kekecewaan dari negara-negara

anggota IWC. Banyak dari mereka yang keluar dari keanggotaan IWC, namun da juga yang bertahan. Hal ini dibarengi juga dengan masuknya negara-negara non whaling yang tidak mempunyai industry whaling, yang masuk IWC dengan tujuan ingin berkontribusi dalam upaya konservasi paus. Akhirnya, negara-negara anggota sepakat dengan perubahan arah kebijakan IWC untuk konservasi paus. Namun, negara-negara anggota lama masih saja pro whaling dengan kepentingan negaranya masing-masing. Hal ini sudah mencerminkan terdapat ketidaksamaan persepsi diantara negara-negara anggota IWC. Terdapat dua kutub besar bersebrangan yang mengisi IWC, yaitu Negara pro whaling dan negara non whaling.

Selanjutnya yaitu Asymmetry yang diartikan sebagai adanya kepentingan nasional yang berbeda-beda antar negara anggota dari sebuah rezim. Dalam IWC, keragaman kepentingan nasional tersebut juga terjadi. Antar negara berbeda-beda.Kepentingan suatu negara menjadi refleksi dari upaya negara dalam mengikuti dan tergabung dalam sebuah perjanjian atau sebuah organisasi. Penulis mencontohkan salah satu negara IWC yang pro whaling,dan juga menghadapi langsung permasalahan di Taiji, yaitu Jepang. Jepang telah melakukan berbagai hal untuk bertahan dalam IWC untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya yaitu tetap menjalankan industry whaling dan menangkap paus. Jepang bergabung menjadi anggota IWC pda tahun 1951 ketika saat itu IWC masih menjadi bada nyang berfungsi untuk mengatur dan menjaga harga minyak ikan paus sebagai bagian dari regulasi dari negara-negara anggotanya yang juga actor dari industry whaling. Jepang termasuk negara whaling karena memiliki sejarah panjang terhadap perburan paus. Perubahan arah kebijakan akibat moratorium menjadikan Jepang

agaknya kecewa. Jepang mengajukan keberatan atas moratorium tersebut saat itu, namun akhirnya dia menarik kembali keberatan tersebut karena mendapat ancaman dari Amerika Serikat berupa pelarangan Jepang mengambil ikan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Amerika Serikat. Akhirnya Jepang memikirkan berbagai cara untuk dapat tetap menangkap paus sesuai dengan kepentingannya. Pada tahun 86/87 Jepang mengajukan proposal pengajuan Scientific Whaling kepada Komite Ilmiah IWC. Ini menjadi satu-satunya opsi Jepang untuk tetap menangkap paus karena Commercial Whaling telah dilarang dalam moratorium. Dalam artikel IV dan VIII dalam konvensi ICRW melegalkan perburuan paus untuk kepentingan ilmiah. Jepang akhirnya membuat program JARPA (Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic) dan JARPN (Japanese Whle Research Program under Special Permit in the Western North Pasific). Dengan hal ini Jepang dapat melegalkan penangkapan paus dengan dalih scientific whaling. Negara lain dalam IWC yang anti-whaling dan berfokus pada konservasi tidak dapat melawannya. Jepang telah menjadi actor besar dalam IWC dan mampu merepresentasikan kepentingan nasional dari awal masuk IWC hingga sekarang.

Ketiga adalah Cumulative Cleavages yang artinya perbedaan yang banyak yang terakumulsi sehingga menimbulkan perpecahan. IWC mengalami hal tersebut. Setelah negara anggota terbagi menjadi dua kubu berseberangan, bahkan pada decade 1970-1980an negara anggota terbagi menjadi 4 kubu. Hal ini menjadi masa paling dinamis IWC saat transisi melakukan moratorium. Keempat kubu tersebut yaitu : Negara pro-whaling dengan industry whaling kuat, Negara pro-whaling yang mendapat pengaruh kaum

environmentalis, Negara anti-whaling dengan pengaruh kuat kaum environmentalis, dan Negara yang menggunakan kekuatan unilateralnya gar mampu mempengaruhi kebijakan negara lain dalam isu whaling. Walaupun setelah moratorium, negara anggota IWC kembali terbagi menjadi dua kubu besar, hal ini menunjukkan IWC mengalami Cumulative Cleavages yang tentu saja perbedaan-perbedaan tersebut masih mungkin terjadi lagi.

Faktor kedua dari keefektifan rezim yaitu Problem Solving Capacity yang diartikan sebagai kapasitas (kemampuan melakukan sesuatu) untuk penyelesaian masalah. Problem Solving Capacity erat kaitannya dengan problem malignancy yang kita bahas sebelumnya. Problem solving capacity dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang malign. Semakin besar kapasitas suatu rezim dalam menangani masalah, maka dia semakin besar pula peluangnya untuk menyelesaikan masalah yang kerumitannya tinggi. Problem Solving Capacity dipengaruhi oelh tiga factor yaitu Institusional Setting, Distribution Power, Skills and Energy.

Institusional Setting diartikan sebagai Setting Kelembagaan yaitu kemampuan institusional dalam mengontrol anggotanya. Penulis menyimpulkan kelemahan yang terdapat dalam Institusional setting IWC. Kontrol IWC lemah terhadap anggotanya. Hal ini dikarenakan kenggotaan IWC bersifat terbuka bagi setiap negara asalkan ingin terlibat tanpa syarat tertentu. IWC juga awalnya dibentuk dengan dasar perjanjian ICRW (Interntional Convention for the Regulation of Whaling), maka legitimasi IWC hanya bergantung pada ratifikasi negara-negara terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Distribution of Power dipahami sebagai Distribusi Kekuasaan, pembagian power diantara actor yang terlibat. Dalam IWC, Dua poros berlawanan di dalamnya , yaitu pro-whaling dan anti-whaling dimana pro-whaling lebih dominan dalam memimpin roda organisasi dan mengatur jalannya organisasi. Inilah terjadi distribution yang tidak imbang. Dalam hal ini, pihak pro-whaling memunculkan Jepang sebagai actor utama yang bertindak sebagai leader sendirian tanpa ada pihak minoritas yang mengontrol pihak dominan. Jepang dapat memainkan power dengan baik. Jepang dapat masuk ke tataran organisasi sekaligus berhasil mencapai kepentingan nasionalnya. Untuk Scientific Whaling misalnya, Jepang telah membuat program JARPA dan JARPN yang berkontribusi sebagai data bagi Komite Ilmiah IWC. Jepang juga mendapatkan hak penangkapan aboriginal untuk wilayah pesisirnya termasuk Taiji. Hak penangkapan aboriginal adalah hak khusus yang diberikan oleh Komite Konservsi IWC untuk daerah yang menangkap paus untuk alasan tradisi dan budaya, seperti contohnya masyarakat Inuit di Alaska. Selain itu, sebgai actor besar di IWC, Jepang berniat untuk mengangkat pelarangan penangkapan paus. Tercatat salah satunya Jepang tealh membentuk forum diluar IWC pada tahun 2007 untuk mencabut moratorium pelarangan penangkapan paus.

Skill and Energy merupkan dua hal untuk mencari solusi yang kooperatif. Semakin besar skill dan energy yang dipunyai, maka efektivitas rezim semakin tercapai. Terdapat dua unsur yang membentuk skill and energy yaitu Instrumental leadership dan Epistemic Community. Instrumental leadership dalam IWC memunculkan Jepang sebagai leader. Dengan masalah yang malign (rumit) Instrumental leader ini tidak cukup skill dan energy dlam mengahadapi kasus pembunuhan lumba-lumba di Taiji. Sementara

Epistemic Community terdiri dari kelompok kerja formal dan non-formal. Saat ini kelompok tersebut tidak mampu memberi pengaruh signifikan dalam IWC. Padahal Epistemic Community berperan dalam proses terbentuknya moratorium. Namun dalam decade terakhir, poros pro whaling lebih dominan dan semakin kuat pengaruhnya sehingga epistemic community tidak mampu menandinginya.

Dengan lemahnya rezim IWC di semua lini tadi, Penulis masukkan ke dalam level of collaboration (tingkat kolaborasi) IWC sebagai sebuah rezim. Dalam skala 0-5, penulis menyimpulkan tingkat kolaborasi rezim (IWC) ada pada skala 2 yaitu Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnya di tangan pemerintah sebuah negara. Tidak ada penilaian terpusat dari suatu tindakan. Dalam IWC, implementasi berada dalam satu pemerintahan satu negara yaitu Jepang sehingga tidak tercapai keefektifannya.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dari penelitian ini. Namun, penulis berharap tulisan ini dapat membantu untuk kegiatan belajar mengajar di jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta diadakannnya penelitian lanjutan terkait masalah Faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan IWC dan juga studi lebih lanjut tentang bagaimana cara mengatasi ketidakefektifan tersebut. Dengan cara demikian, penulis berharap tulisan ini juga dapat menambah pengetahuan mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional kedepannya.